

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kapasitas dalam sektor kelautan yang sangat besar. Secara geografis Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kepulauan yang lebih luas dibandingkan daratannya dengan luas laut sekitar 5,8 juta km² yang merupakan dua per tiga dari keseluruhan wilayah Indonesia. Di dalam laut Indonesia tersebut terdapat sekitar 17.500 lebih gugusan pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 km (Ambarwati 2014). Selain itu Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat unik dan strategis, hal ini dapat dilihat dari letak geografis Indonesia yang berada tepat pada titik persilangan dunia. Dengan kondisi geografis yang strategis tersebut, membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup aktif dalam *traffic* komunikasi internasional baik lateral maupun bilateral dimana Indonesia merupakan salah satu urat nadi perdagangan Internasional.

Indonesia tidak hanya memiliki satu “laut utama” atau *heart of sea*” tetapi terdapat 3 laut utama yang membentuk Indonesia sebagai *sea system* yaitu laut Jawa, laut Flores dan laut Banda. Laut Jawa merupakan kawasan jantung perdagangan laut kepulauan Indonesia dan telah diintegrasikan oleh jaringan pelayaran dan perdagangan sebelum datangnya bangsa Barat.

Sementara itu Houben menyatakan bahwa laut Jawa bukan hanya merupakan laut utama bagi Indonesia, tetapi juga merupakan laut inti bagi kawasan Asia Tenggara (V.J.H Houben dan H.MJ. Maier 1992).

Aspek maritim tentu sangatlah penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Maritim yang berartikan segala sesuatu yang berkenaan dengan laut dan berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan laut ini sudah lekat dengan Indonesia sejak zaman kerajaan terdahulu, dimana Indonesia yang sebagian besar terdiri dari laut ini telah dikuasai dengan adanya armada perang dan dagang yang besar pada saat itu (Pusjianmar 2010).

Laut merupakan prasarana bagi angkutan laut dalam menciptakan alur pelayaran yang merupakan urat nadi suatu wilayah, negara dan berhubungan dengan dunia luar. Sejak diratifikasinya *United Convention on the Law of The Sea* (UNCLOS) melalui Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, dimana Indonesia belum memiliki kebijakan yang secara spesifik dalam mengatur laut. Perjanjian Internasional (Konvensi Hukum Laut) ini mendefinisikan mengenai adanya hak dan tanggung jawab sebuah negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan untuk pedoman, bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut (Prof.Dr.Etty R. Agoes 2009). Hal ini tentu saja sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam hal penguasaan atas wilayah laut. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia telah berusaha

memperjuangkan status Negara kepulauan sejak Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.

Sebagai negara kepulauan yang berwawasan, untuk mewujudkan suatu kesatuan wilayah perlu adanya kesatuan didalam politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Konsep negara maritim adalah sebuah konsep yang mengedepankan pemanfaatan semua sumber daya alam di wilayah laut untuk kepentingan rakyat dan kemakmuran suatu negara (Negara dan Kedaulatan 2010).

Walaupun Indonesia merupakan negara maritim sejak masa prasejarah, namun kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia, terutama potensi ekonomi lautnya masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah dimana pemerintah tidak begitu serius dalam menggarap sektor kelautan dan perikanan (Kusumo 2015). Pembangunan dan ekonomi Indonesia masih berbasis pada eksplorasi dan pengolahan wilayah daratan, padahal perairan Indonesia lebih luas dan potensial untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut yang mendasari pemikiran Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan visi poros maritim dunia.

Sebelumnya ada beberapa kebijakan pembangunan wilayah pemerintahan terdahulu mengenai pengelolaan laut. Soekarno menggagas adanya pembangunan kekuatan maritim, melalui pembangunan ekonomi kelautan Indonesia dimulai dengan dicituskannya Deklarasi Djuanda. Namun Gagasan tersebut belum dapat direalisasikan pada masa pemerintahannya, tetapi sudah menjadi dasar untuk kebijakan saat ini.

Bertentangan dengan gagasan Soekarno, pembangunan pada masa Soeharto lebih bersifat *land minded*. Pembangunan wilayah darat lebih diutamakan karena perhatian dari kebijakan Soeharto adalah permasalahan pertanian dan pangan. Era pemerintahan Habibie tidak menunjukkan kebijakan tertentu untuk pengelolaan lahan. Reformasi yang baru saja bergulir dan kondisi domestik yang belum stabil serta permasalahan Timor Timur membuat pengelolaan lahan menjadi terabaikan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gusdur), dibentuk Departemen Maritim, yang saat ini disebut dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembentukan departemen ini menunjukkan bahwa Gusdur mempunyai perhatian khusus di bidang maritim. Sementara itu, era pemerintahan Megawati tidak menunjukkan kemajuan yang berarti dalam bidang maritim. Era pemerintahan SBY tidak mengangkat isu maritim sebagai bagian utama dari kebijakannya. Namun, perhatian terhadap isu maritim sudah tertuang dalam MP3EI. Strategi pengembangan potensi maritim juga sudah dimuat di dalam MP3EI yang dibentuk pada tahun 2011. MP3EI inilah yang menjelaskan mengenai konektivitas nasional dan regional serta konsep pengamanan laut Indonesia.

Melalui Presiden Joko Widodo visi pembentukan poros maritim dunia tersebut tidak hanya menjadi kebijakan dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Hal tersebut berkaitan dengan kapal asing ataupun negara lain yang juga memerlukan wilayah perairan Indonesia, tidak hanya untuk sebagai jalur pelayaran, tetapi juga sebagai tempat melakukan bisnis. Apalagi kebijakan

tersebut sudah dipaparkan Jokowi di dalam *East Asian Summit* (EAS) pada tanggal 13 November 2014, yang merupakan forum interaksi pemimpin-pemimpin dari berbagai negara. Presiden Joko Widodo menuturkan ada lima pilar utama yang diagendakan dalam pembangunan sebagai visi pemerintahannya yang bertujuan agar Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Pilar pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia, Pilar kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut, Pilar ketiga, memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, Pilar keempat, melaksanakan diplomasi maritim, dan Pilar kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim (Si 2014).

Program Maritim yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ini merupakan salah satu program dari 9 (Sembilan) program Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang pertama yaitu; Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan membangun pertahanan Negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim (Pellokila 2013). Tentu saja keinginan Pemerintah Indonesia dalam mengelola kekayaan maritim ataupun kelautan dan meningkatkan kekuatan Angkatan laut ini pasti akan menemui tantangan dan hambatan. Sehingga perlu adanya tindakan yang serius dalam mewujudkan visi Presiden Jokowi sebagai upaya pelaksanaan dalam mengelola, mengembangkan dan memajukan laut Indonesia agar dapat terealisasi. Jika pembangunan Poros

Maritim Dunia ini bisa direalisasi maka tentu saja akan banyak manfaat dan keuntungan yang diperoleh oleh Pemerintah Indonesia, dan sebagai dasar dalam pemerataan pembangunan antara daratan dan lautan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut:

“Mengapa Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan poros maritim di era kepemimpinannya di Indonesia”?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penulisan ini dimaksudkan untuk :

1. Menjelaskan sebab akibat adanya penerapan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
2. Menjelaskan tindakan Presiden Joko Widodo dalam mengimplementasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
3. Sebagai syarat dalam menyelesaikan ujian Sarjana pada Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

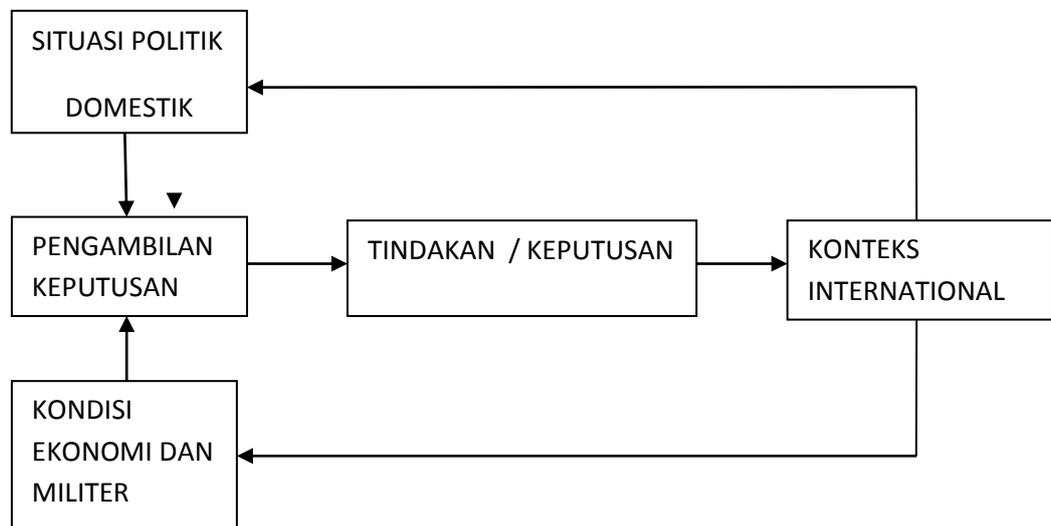
D. Kerangka Pemikiran

Agar dapat memberikan penjelasan tentang Negara Maritim Indonesia dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan Teori kebijakan (*Decision aking*) dan Konsep Implementasi.

1. Teori Pembuat Kebijakan (*Decision Making*)

Teori pembuatan kebijakan luar negeri yang diungkapkan oleh William D. Coplin bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi beberapa faktor determinan, antara lain :

- a. Situasi politik domestik, termasuk faktor budaya sebagai dasar tingkahlaku politik manusianya;
- b. Situasi ekonomi dan militer domestik, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam hal ketahanan dan keamanan;
- c. Konteks Internasional, situasi di negara yang menjadi politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.



Menurut William D. Coplin dalam teori pembuatan keputusan (*Decision Making Proses*) yang mengatakan bahwa apabila kita menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus

mempertanyakan peran dari pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin (pembuat keputusan) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut, dianggap sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi pembuat keputusan. Yang Pertama adalah kondisi politik di Negara tersebut termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer di Negara tersebut termasuk faktor geografis yang menjadi pertahanan dan pertimbangan untuk pertahanan dan keamanan. Ketiga, konteks Internasional atau situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi (Coplin 1992).

Disini penulis mencoba menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan mengenai alasan Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan poros maritim di era Kepemimpinannya di Indonesia.

Menurut Presiden Joko Widodo, Di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi maritim tentu saja akan selalu sejalan dengan peningkatan militer yaitu dengan cara meningkatkan alutsista angkatan laut, sebagai upaya untuk melindungi kekayaan maritim serta kedaulatan Indonesia. Indonesia sangatlah berperan penting bagi keamanan navigasi Internasional karena letak Indonesia yang berada di posisi strategis sebagai negara kepulauan dan juga strategis pula untuk perdagangan dunia. Di Indonesia sendiri yang terdiri dari bermacam macam suku, dan budaya

yang dipisahkan oleh pulau-pulau, kita tau bahwa meskipun laut Jawa merupakan jantung perdagangan kepulauan Indonesia, akan tetapi, dominasi politik Jawa sendiri cenderung memfokuskan pembangunannya pada wilayah daratan, yakni melalui transportasi darat, karena prasarana angkutan sudah maju dibandingkan pulau-pulau yang lainnya, seperti jalan raya, jalan tol, dan jalur kereta api. Selain itu juga suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, “Bhineka Tunggal Ika (“Berbeda tetapi tetap satu”), berarti keberagaman yang membentuk negara. Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki penduduk terbanyak (Tatriana 2015).

Selain daripada itu dalam menanggapi masalah perbatasan, Indonesia dapat dibilang cenderung lamban. Indonesia memiliki banyak masalah perbatasan yang belum terselesaikan, antara lain Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Timor Leste, Indonesia dengan dengan Filipina, Indonesia dengan Thailand, dan masih banyak lagi, yang paling utama adalah masalah-masalah Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Selama beberapa puluh tahun belakangan kawasan perbatasan memang masih belum mendapat perhatian yang cukup serius, dilakukan tidak optimal dan kurang terpadu, tarik menarik kepentingan sektoral dan horizontal. Kawasan perbatasan juga merupakan cerminan dari tingkat kemakmuran antara dua negara. Tidak jarang kawasannya ini menjadi ajang konflik antar penduduk berbeda kewarganegaraan karena tujuan

tertentu. Negara tetangga seperti Malaysia (Sabah dan Sarawak) secara ekonomi jauh lebih maju. Perbedaan kondisi sosial ekonomi dapat menimbulkan sejumlah efek negatif cenderung merugikan Indonesia. Seperti dalam hal “pemanfaatan” sumberdaya alam oleh negara tetangga tanpa kompensasi dan kewajiban memadai, dapat mengakibatkan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan maupun gangguan terhadap kehidupan penduduk, bahkan kehidupan sosial ekonomi beberapa kawasan perbatasan Indonesia sangat bergantung pada kegiatan ekonomi negara tetangga (Sabur 2014).

Dalam konteks lingkungan eksternal, Indonesia mempunyai sejumlah tantangan praktis yang terjadi di perairan Indonesia. Salah satunya adalah pencurian ikan. Ada sejumlah daerah rawan pencurian ikan. Daerah tersebut antara lain Perairan Natuna, Perairan Natuna Barat (Kepulauan Riau), Laut Arafuru Selatan, Bitung Utara, Kepala Burung (Papua Barat), Samudera Hindia, serta Laut Segitiga Emas yang menghubungkan Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Hasil pencurian tersebut dijual ke negara Thailand, Filipina, dan Vietnam. Kerugian yang disebabkan oleh pencurian ikan tersebut mencapai Rp 101,04 triliun per tahun. Untuk menangani permasalahan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, memberlakukan kebijakan moratorium kapal yang berkapasitas 30 gross ton sejak tanggal 3 November 2014 (Putra 2014).

Mutlak untuk disadari bahwa dalam membangun bangsa ini diperlukan instrumen-instrumen maritim serta Angkatan laut sebagai

military power yang kuat, diperlukan suatu gorong royong yang kuat antar stakeholder maritim dalam *nation building* maritim (Amanat 1965).

Negara Indonesia merupakan negara yang berperan penting dalam percaturan dunia, hal ini bisa kita lihat dari letak wilayah Indonesia yang menghubungkan dua benua yaitu Asia dan Australia. Keberadaan Indonesia saat ini pun telah dikenal oleh Negara-negara lain. Karena Indonesia mempunyai banyak kebudayaan serta berbagai macam flora dan fauna yang dapat memikat wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu Indonesia dianggap penting bagi negara lain. Peran Indonesia dimata asing pun sangat dibutuhkan, hal ini dibuktikan dengan Indonesia banyak bergabung pada hubungan diplomatik dengan negara lain.

2. Konsep Implementasi

Konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasarkan ciri-cirinya yang relevan bagi kita.

Fungsi konsep yang pertama-tama, konsep berfungsi sangat penting dalam kegiatan pemikiran dan komunikasi hasil pemikiran itu. Fungsi kedua memperkenalkan suatu sudut pandang. Ketiga, konsep berfungsi sebagai sarana untuk mengorientasikan gagasan, persepsi dan simbol, yaitu dalam bentuk klarifikasi dan generalisasi. Fungsi konsep yang keempat adalah menjadi batu-bata bagi bangunan yang disebut teori.

Definisi Konseptual merupakan definisi yang menggambarkan konsep dengan menggunakan konsep-konsep lain, disebut definisi konseptual, misalnya *power* secara konseptual didefinisikan sebagai “kemampuan suatu aktor (individu, kelompok, atau negara bangsa) mempengaruhi pikiran dan tingkah laku aktor.

Definisi Operasional adalah serangkaian prosedur yang mencandara (mendeskripsikan) kegiatan yang harus dilakukan kalau kita hendak mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi empiris suatu konsep. Melalui definisi seperti itu, makna suatu konsep dijabarkan (Mas'ood 1994).

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan (Kurnia 2015) Rangkaian kegiatan tersebut mencakup. Pertama persiapan seperangkat aturan peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan

tersebut. Ketiga, Bagaimana menghantarkan kebijakan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kekuatan pada diri kelompok sasaran. Melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menerapkan arah agar tujuan kebijakan politik publik direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah (Teori 2011)

Secara ontologis, *subject matter* studi implementasi adalah atau dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik, seperti: (i) mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan disuatu daerah; (ii) mengapa suatu kebijakan publik yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintah, memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika diimplementasikan oleh pemimpin daerah; (iii) mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibanding dengan jenis kebijakan lain; (iv) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Erwin Agus Purwanto 2012).

Dalam mengembalikan kejayaan laut nusantara maka Indonesia harus mengedepankan strategi pembangunan negara maritim, mengatasi hambatan dan tantangan yang akan dihadapi untuk jangka panjang. Pembangunan kelautan memerlukan suatu perencanaan yang

terkoordinasi, komprehensif dan berpihak terhadap kepentingan masyarakat serta lingkungan. Oleh karena itu keterpaduan antar tujuan pembangunan *stakeholder* serta antar sektor dalam bidang kelautan harus dapat dituangkan melalui suatu kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan di atas, penulis memiliki beberapa pertimbangan hipotesa terhadap alasan Presiden Joko Widodo dalam menerapkan poros maritim. Berdasarkan kerangka teori yang dibangun, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan tersebut yaitu :

- Presiden Jokowi menerapkan kebijakan poros maritim di era kepemimpinannya di Indonesia karena;
1. Aspek Politik mengingat pada masa pemerintahan sebelumnya, aspek maritim bukanlah menjadi prioritas utama dalam mengembangkan laut.
 2. Aspek Ekonomi Penyetaraan tingkat ekonomi di Indonesia terkait kesejahteraan masyarakat, baik kesehatan dan pendidikan.
 3. Aspek Militer memperkuat basis pertahanan perbatasan mencangkup alutsista negara.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam upaya untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu luas dan semakin kabur maka penulis memberikan batasan pembahasan pada upaya Presiden Jokowi dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim Dunia. (hambatan-hambatan yang dihadapi serta implementasinya)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisa data yang sifatnya non angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya (Arikunto 2006). Agar memudahkan dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan adalah: Metode Kepustakaan (*Library Research*), adalah pengumpulan data atau informasi dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku referensi, majalah ilmiah, serta buku-buku teks yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini berupa data sekunder dari *literature* (buku, jurnal ilmiah, media cetak, dan situs internet).

H. Sistematika Penulisan

BAB PERTAMA : Bab ini berisi tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB KEDUA : Bab ini mengulas tentang Konsep negara maritim yang diterapkan Jokowi terhadap Indonesia, Kondisi

geografis Indonesia sebagai negara maritim, Kebijakan pemerintah sebelumnya, Negara yang menjadi perbandingan penerapan konsep maritim/*sea power*.

BAB KETIGA : Bab ini mengulas tentang rancangan kebijakan terkait konsep negara maritim pemerintah Jokowi, dari segi ekonomi, politik dan militer.

BAB KEEMPAT : Bab ini menjelaskan tentang alasan pemerintah menerapkan kebijakan poros maritim, Upaya Pemerintah Jokowi dalam mengimplementasikan Indonesia sebagai Poros Maritim, serta hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Jokowi dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim.

BAB KELIMA : Bab ini merupakan bagian Kesimpulan dan Penutup, yang berisi penyimpulan dan kata penutup yang ditarik dari pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya.